

MENGAGAS PEMBELAJARAN EKONOMI PLURALIS DI NEGERI PANCASILAIS

M. BASRI

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan tawaran pembelajaran ekonomi pluralis di Indonesia dengan mengedepankan membelajarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai poros utama pembelajaran ekonomi, sementara perspektif ilmu ekonomi yang lain (klasik, neo-klasik, marxian, keynesian, post-keynesian, institutionalist, environmentalist, feminist, syariah, dll) diajarkan dalam rangka memperkaya alternatif pemecahan masalah-masalah ekonomi, namun tidak sekedar sebagai pelengkap pembelajaran. Sistem *plug in* (berbagai perspektif ilmu ekonomi) dilakukan dalam kurikulum pembelajaran ekonomi, dengankombinasi pendekatan deduktif-induktif merupakan pilihan yang menarik dalam membelajarkan ekonomi pluralis.

Kata kunci: *Gagasan Pembelajaran, Ekonomi Pluralis, Sistem Ekonomi Pancasila*

LATAR BELAKANG

Kajian problematika pembelajaran ekonomi dunia berkembang pesat seiring dengan munculnya berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang. Banyak istilah baru dalam pembelajaran ekonomi muncul dengan masing-masing pertentangannya, misal saja orthodox vs heterodox, monist vs pluralist. Kaum orthodox/monist biasanya direpresentasikan sebagai kelompok yang mengajarkan tentang bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi dengan perspektif ekonomi yang mainstream (paham Adam Smith klasik neo-klasik keynesian), sementara itu kelompok penentang/pengkritik, yakni kaum heterodox/pluralist adalah kelompok yang menganjurkan pentingnya membelajarkan ekonomi dari berbagai perspektif, selain berdasarkan paham Adam Smith, klasik, neo-

klasik, dan keynesian perlu pula dibelajarkan paham marxist, post-keynesian, institutionalist, environmentalist, feminist, (seharusnya juga) syariah, dan perspektif baru lainnya yang telah teruji secara teoritis dan empiris. Paham kedua inilah yang melatar belakangi munculnya semangat pluralisme dalam pembelajaran ekonomi. Namun harus diakui, pengkotakan istilah orthodox = monist dan heterodox = pluralist bukanlah sesuatu yang tepat, mengingat kaum orthodox = monist (juga) tidak selalu menentang adanya arus baru dalam pembelajaran ekonomi.

Berbagai kritik terhadap pembelajaran ekonomi mazhab orthodox telah banyak dilontarkan, hingga bermunculan ungkapan/istilah yang cukup menggelitik, misalnya **Bastard Keynesianism**' (Harcourt 2001), **The Anti-Samuelson** (Linder 1977), **No Thankyou Mankiw** (2002) dan berbagai ungkapan/istilah lainnya yang pada intinya mengkritik *text-*

Alamat korespondensi:

M. Basri, Dosen FKIP Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak

Email: Basri.HAK@gmail.com

book standar [McTaggart, Findlay and Parkin (2005), Stiglitz (2006), Samuelson and Nordhaus (1998), Mankiw (2005), dll.] yang dipergunakan dalam pembelajaran ekonomi.

Di Indonesia sendiri salah kaprah pendidikan dan pembelajaran ekonomi terlihat secara jelas jika kita bandingkan antara cita-cita ekonomi para pendiri bangsa (yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945) dengan materi-materi pembelajaran bidang ekonomi yang diajarkan di sekolah/ perguruan tinggi. Dengan kata lain bahwa pendidikan dan pembelajaran ekonomi yang terjadi tidak sesuai dengan filsafat pendidikan ekonomi yang seharusnya.

Sistem ekonomi Pancasila/kerakyatan bagi sebagian besar pelajar dan mahasiswa di Indonesia berstatus “dekat di mata jauh di hati”, yang terjadi karena salah kaprah pembelajaran ekonomi di Indonesia tadi, yang memiliki kecenderungan membelajarkan *mainstream* ekonomi klasik dan neo-klasik yang berpaham materialis, sementara sistem ekonomi Pancasila/kerakyatan berpaham humanis. Hal ini tentu menjadi persoalan, karena pelajar/mahasiswa akan semakin jauh dengan paham ekonomi bangsanya sendiri. Di sisi lain, bukanlah hal yang salah membelajarkan perspektif ekonomi klasik/neo klasik dan berbagai perspektif lainnya bagi pelajar/mahasiswa Indonesia, tetapi perlu perimbangan yang proporsional yang kelak diharapkan akan memperkaya perkembangan Sistem Ekonomi Pancasila. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyampaikan gagasan tentang pembelajaran ekonomi pluralis di Indonesia.

METODOLOGI

Artikel ini ditulis dengan pendekatan studi literatur, yang selanjutnya dilakukan analisis kritis dan evaluasi rasional terhadap pendidikan dan pembelajaran ekonomi nasional, dan hasil kajian empiris perkembangan pendidikan dan pembelajaran ekonomi.

EKONOMI PLURALIS

Setidaknya terdapat lima alasan perlunya pembelajaran ekonomi pluralis: (1) Sebagai respon terhadap keadaan pembelajaran ekonomi yang terbelakang; (2) sebagai pengakuan disiplin karakter politik yang esensial; (3) sebagai prasyarat untuk kemajuan analisis dan kemajuan ekonomi; (4) sebagai pedagogi yang menumbuhkan kapasitas siswa untuk penilaian kritis dan komparatif. (mengutip Four Reason dari Stillwel, 2006: 44); (5) Disiplin/perspektif ilmu itu jamak, begitu pula ilmu ekonomi, sehingga adalah tidak jujur jika kita hanya menyampaikan satu disiplin/perspektif kepada peserta didik untuk memecahkan masalah ekonomi. (Andy Denis, 2009: 13).

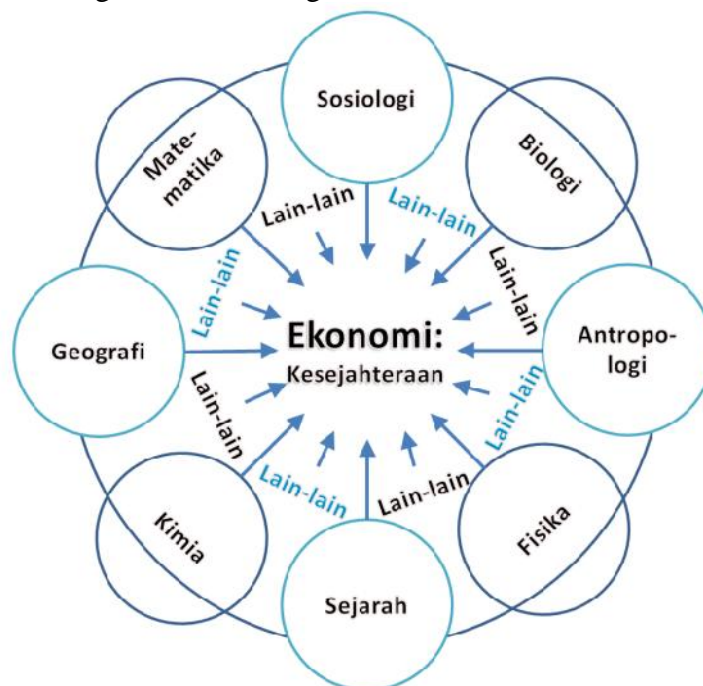
Pembelajaran ekonomi pluralis dapat dilihat dari dua paradigma yang berbeda. **Paradigma pertama** melihat bahwa semua ilmu pengetahuan (baik ilmu sosial maupun eksakta) pada prinsipnya dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia, yang muaranya dititik beratkan pada **kesejahteraan ekonomi** manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Pluralisme ekonomi dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga setiap bidang ilmu (apapun itu) akan menjadi bagian

yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraannya.

Sajogyo dan David Penny (dalam Mubyarto, 2004) mengatakan “Jika Anda ingin mengerti **perekonomian** negeri kami, kajilah **kebudayaan** dan sistem **politik** kami; jika ingin memahami **kebudayaan** dan sistem **politik** kami, kajilah **perekonomian** kami”. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa ilmu ekonomi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan bidang ilmu yang lain.

Perkembangan pembelajaran ekonomi di Indonesia pada tingkat dasar telah ada model yang memadukan pembelajaran ekonomi dengan bidang ilmu lainnya, yakni IPS terpadu, namun pendekatan ini bukanlah pendekatan yang pluralis, karena masih mengabaikan bidang

ilmu lainnya, terutama bidang ilmu eksakta. Pada jenjang pembelajaran yang lebih tinggi, adapula kombinasi-kombinasi bidang ilmu yang sering dijadikan tema-tema pembelajaran, misalnya ekonomi-politik, sosiologi-ekonomi, geografi-ekonomi, geofisika dan berbagai kombinasi lainnya, yang dalam hal ini juga bukan bermakna pembelajaran ilmu pluralis. Dalam pembelajaran ilmu pluralis digambarkan bahwa kehidupan manusia dalam upaya memenuhi kesejahteraannya tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan yang dipelajari dalam bidang ilmu yang lain, sehingga tidak dipilah-pilah, hanya saja porosnya adalah kesejahteraan manusia, utamanya kesejahteraan bidang ekonomi, sebagaimana digambarkan berikut ini:



Gambar 1. Pluralisme Ilmu Ekonomi

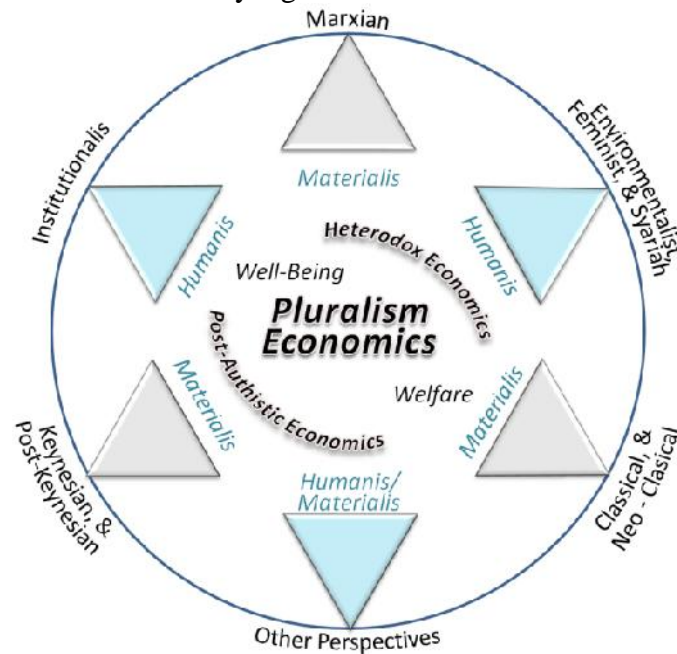
Gambar di atas memperlihatkan poros semua kajian ilmu baik ilmu-ilmu sosial maupun eksakta semuanya berporos pada kesejahteraan (ekonomi) yang hendak dicapai oleh

manusia selain konsep kesejahteraan non ekonomi lainnya.

Paradigma kedua adalah paradigma yang paling populer, yakni membelajarkan beberapa perspek-

tif ilmu ekonomi (klasik, neo-klasik, marxian, keynesian, post-keynesian, institutionalist, environmentalist, feminist, dll) untuk memecahkan masalah ekonomi manusia, baik yang berpaham materialis yang

berupaya mensejahterakan manusia secara individu, maupun yang berpaham humanis yang berupaya mensejahterakan manusia secara bersama-sama, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Pluralisme Perspektif Ilmu Ekonomi

Paradigma kedua ini sedang banyak diperbincangkan di dunia pembelajaran ekonomi, terutama pada negara penganut sistem ekonomi kapitalis/liberal/pasar yang kurikulum pembelajaran ekonominya *ber-mainstream* pada aliran klasik dan neo-klasik (meskipun sudah ada yang bergeser hingga keynesian), sehingga kritik-kritik (sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya) banyak bermunculan untuk merubah kurikulum pembelajaran ekonomi yang sedang berlaku. Berikut disajikan beberapa konsep ekonomi pluralis.

Stilwell (2006: 44) mengatakan bahwa *“Pluralist teaching is not a matter of simply presenting different schools of thought: it is about under-*

standing how those competing bodies of analysis developed and how they relate to each other. It bridges between the study of the history of economic thought and a problem-based approach to teaching. The pluralist alternative is no panacea though, generating its own intrinsic challenges”.

Pembelajaran ekonomi pluralis memang tidak sekedar berupaya mengajarkan berbagai aliran/perspektif pemikiran-pemikiran ilmu ekonomi, melainkan bagaimana mencari perbandingan-perbandingan antar perspektif serta mencari keterkaitan-keterkaitan antar perspektif satu sama lain (bukan sekedar sejarah pemikiran ekonomi), sehingga meskipun diyakini pembelajaran ekonomi pluralis adalah alternatif

yang menarik, tetapi akan ada hambatan/tantangan tersendiri dalam mengajarkannya.

Sementara itu Denis (2009: 7) mengatakan

We start with two salient facts about the world. The first fact is that there are, not one, but many sciences of economics. To illustrate: as well as the neoclassical family of schools of thought – including neo-classical Keynesians, monetarists, new Keynesians, new classical and real business cycle theorists, new institutionalists, new economic geographers and analytical Marxists – there is a constellation of heterodox schools, including Post Keynesians, Marxians, Austrians, institutionalists, Georgists, Associative economists, feminists, and critical realists, as well as Muslim, Christian and Buddhist economists, in so far as they regard their religion as informing their economics. My suggested system of classification may (in fact certainly does) lack consensus, but the basic fact of interest here is indisputable. There are many economics: many sciences, many practices, many visions and paradigms of economics – that is simply a fact that we have to recognise and deal with.

Denis berupaya menggambarkan bahwa faktanya ilmu ekonomi tidak hanya satu perspektif, tetapi memiliki banyak perspektif. Dari keluarga neo-klasik ada neo-klasik, keynesian, monetaris, neo-keynesian, *real business cycle theorists*, *New Institution-*

alist, *new economic geographers* dan *analytical Marxists*, di sisi lain ada keluarga heterodox di antaranya post-keynesian, Marxian, Austria, Institutionalist, Georgists, *Associative economists*, *feminists*, *critical realists*, ekonomi Islam (syariah), kristen dan Budha. Kesemuanyaseharusnya dibelajarkan kepada peserta didik, karena merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dibantah memiliki visi dan paradigma tersendiri, yang dapat bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan ekonomi.

Sementara itu Andy Denis (2009: 14 - 15) menyatakan bahwa:

Pluralist undergraduate education in economics is a process of teaching and learning focused on the co-existence of multiple approaches – all of which are presumed to be valid, until theoretically and empirically refuted. It uses controversy between these schools of thought as the means towards developing pluralist students, that is, students with the capacity not simply to reproduce and apply one particular theory, but who are knowledgeable about, and have insight into, the main intellectual trends within the discipline, and the ability to discriminate between their pronouncements on the basis of logical cogency and empirical relevance. The aim of pluralist teaching is equip students to exercise their own professional judgement as economists. To this end, pluralism

cannot be reduced to synthesis or inclusion, but has to be based on systematic deployment of controversy as means of understanding and educating. It means introducing students to controversy and debate from day one of their programme.

Pendapat di atas menggambarkan pembelajaran pluralis dilakukan dengan menggunakan beberapa perspektif yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan sampai kemudian perspektif tersebut dapat terbantahkan secara teori dan empiris. Pembelajaran pluralis dimaksudkan untuk memberikan wawasan ilmu ekonomi yang beragam dalam memecahkan masalah ekonomi, dengan konsep yang logis dan relevan dengan empiris. Tujuan pengajaran ekonomi pluralis lebih dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada peserta didik untuk mampu mengambil keputusan profesional sebagai ekonom, yang artinya pembelajaran ekonomi akan menciptakan kontroversi dan perdebatan mengenai cara menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi.

Freeman (2009: 24) menyatakan bahwa *“The pluralist economist makes explicit the alternative theoretical approaches relevant to any given problem, whether or not she or he agrees with them, presenting the different solutions and policies which might arise from each approach, the presuppositions on which it rests, and the basis – in any given case – for choosing between them”*. Pendapat ini menekankan pada pentingnya ekonomi pluralis sebagai alternatif yang relevan dalam memecahkan masalah yang berbeda-beda yang mungkin timbul dengan

memilih pendekatan yang tepat bagi permasalahan tersebut.

Pembelajaran Ekonomi Pluralis dengan Metode Deduktif dan Induktif.

Pengajaran ilmu ekonomi pluralis dapat dilakukan dengan metode deduktif dan induktif sekaligus, yang dilakukan dengan mengkaitkannya dengan penelitian, yang dikenal dengan *teaching through research* (mengajar melalui penelitian). Dalam cara mengajar yang demikian, murid/mahasiswa diajak meneliti oleh guru/dosen dalam “tim penelitian”, yang berarti guru/dosen juga terus-menerus “ikut belajar” bersama murid/mahasiswa. Inilah yang juga disebut *problem-posing education* (pendidikan dengan mengetengahkan masalah-masalah praktis pada peserta didik), yang dilawankan dengan *banking education* yang semata-mata berarti pemindahan/mendeposit ilmu pengetahuan kepada peserta didik (Mubyarto, 2004).

Tantangan terbesar pembelajaran ekonomi yang terjadi pada negara yang pembelajarannya *mainstream economics* adalah pada kurikulum yang berlaku, sehingga pembelajaran ekonomi pluralis hanya terjadi dengan menambahkan perspektif ilmu ekonomi yang berbeda sebagai pembanding analisis yang menjadi pelengkap (untuk menambah wawasan) atau bahkan hanya sekedar catatan kaki, karena kurikulum yang berlaku tidak memberi ruang yang banyak untuk menggunakan perspektif ilmu ekonomi yang lain sebagai pembanding secara utuh, sehingga berbagai upaya solusi coba dikembangkan. Hampir sejalan dengan yang dianjurkan

kan oleh Mubyarto, Austen (Curtin Business School, Perth, Western Australia) menganjurkan penggunaan hasil karya Penerima Nobel bidang Ekonomi sebagai bahan perkuliahan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi secara deduktif dan induktif sekaligus.

Penelitian yang dilakukan Austen (2007) yang merancang dan mengajar perkuliahan yang berbasis pada kehidupan dan ide-ide baru pemenang Nobel di bidang ekonomi, sebagian besar hasilnya menunjukkan hal yang positif: yang telah memberi wawasan persepsi mahasiswa tentang *mainstream* ekonomi; mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang ekonomi; dan cara di mana ide-ide hebat dapat disajikan dalam cara yang berguna dan bermakna. Bahkan pembelajaran ini cenderung memiliki relevansi dengan pengajar ekonomi yang lain, dan dapat bekerja dalam berbagai konteks yang berbeda. Austin menganjurkan penggunaan nobel dalam pembelajaran ilmu ekonomi dengan maksud mengajarkan kepada mahasiswa berbagai perspektif baru dalam penyelesaian persoalan ekonomi. Selain itu dimaksudkan pula bahwa dengan menggunakan hasil karya penerima nobel bidang ekonomi, tidak akan ditemukan tantangan yang berarti dari kaum orthodox, karena merupakan hasil kajian ilmiah dan telah memperoleh pengakuan.

Apa yang dianjurkan oleh Mubyarto dan Austen pada dasarnya model pembelajaran ekonomi dengan gabungan metode deduktif dan induktif yang dapat dilakukan untuk membelajarkan ekonomi pluralis tanpa harus mendikte peserta didik tentang perspektif mana yang

sebaiknya digunakan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi.

PEMBAHASAN

Sistem Ekonomi Pancasila sebagai Poros Utama

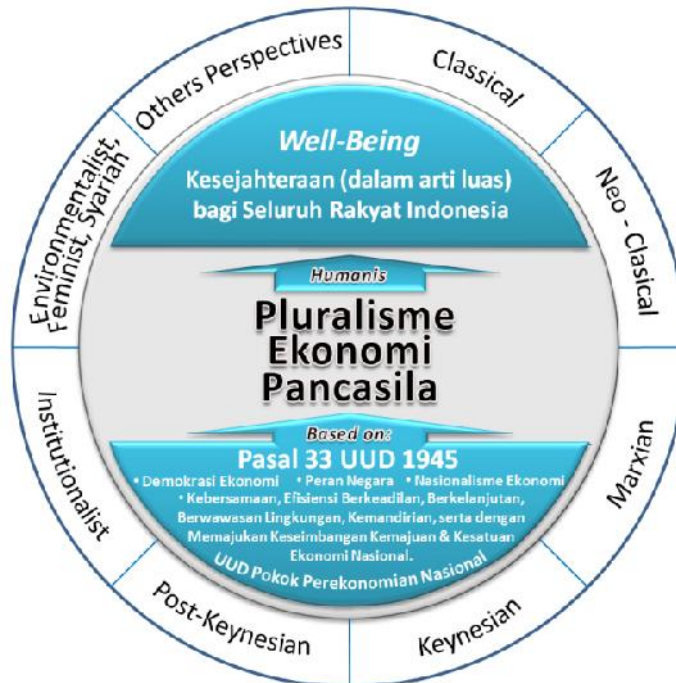
Pembelajaran ekonomi pluralis di Indonesia harus menekankan apa yang menjadi *core* dalam *subject matter* ilmu ekonomi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Sebagai penganut sistem ekonomi Pancasila/Kerakyatan, maka inti dari ilmu ekonomi yang harus diajarkan adalah berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, baik yang terdapat dalam pembukaan maupun yang terdapat dalam batang tubuh.

Kalimat “memajukan kesejahteraan umum” serta seluruh sila pada alinea ke empat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 seyogianya menjadi landasan filosofis pembelajaran ekonomi di Indonesia. Sementara seluruh ayat (5 ayat) yang terdapat dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah landasan yuridis pembelajaran ekonomi di Indonesia.

Pembelajaran ekonomi yang ada saat ini belum terstruktur berdasarkan kedua landasan di atas, yang tampak jelas pada *subject matter* pembelajaran ekonomi di Indonesia lebih dekat dengan dengan sistem ekonomi liberal/kapitalis. Dua hal yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah (1) Salah kaprah pendidikan dan pembelajaran ekonomi; serta (2) Kecenderungan kerjasama perdagangan Indonesia dengan negara-negara penganut sistem ekonomi liberal. Kondisi pertama menjadi persoalan penting dalam penyelenggaraan

pendidikan ekonomi, karena pendidikan dan pembelajaran ekonomi adalah pembentuk utama mentalitas dan *mindset* ekonomi masyarakat Indonesia.

Subject matter pembelajaran ekonomi yang seharusnya terjadi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Subject Matter Pembelajaran Ekonomi di Indonesia

Gambar di atas menunjukkan bahwa seyogianya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (dasar pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila) adalah poros utama pembelajaran ekonomi di Indonesia, sementara itu perfektif ilmu ekonomi yang lain (klasik, neoklasik, marxian, keynesian, post-keynesian, institutionalist, environmentalist, feminist, dll) akan mempercantik dan memperkuat sistem ekonomi Pancasila yang tidak menolak perubahan dan globalisme.

Apa saja yang perlu dipertegas dalam materi inti pembelajaran ekonomi yang berbasis sistem ekonomi Pancasila/Kerakyatan? Ini perlu terjawab terlebih dahulu, mengingat belum ada Undang Undang Pokok perekonomian yang secara tegas dan rinci menjelaskan tentang bagaimana aplikasi sistem

ekonomi Pancasila dalam perekonomian nasional serta kaitannya dengan perekonomian global.

Terdapat 15 (Lima Belas) asas pokok gagasan Undang Undang Pokok Perekonomian berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun;
2. Usaha bersama;
3. Azas kekeluargaan (*brotherhood*);
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara;
5. Cabang-cabang produksi yang menguasai hayat hidup orang banyak;
6. Dikuasai oleh negara;
7. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;

8. Sebesar-besar kemakmuran rakyat;
9. Demokrasi ekonomi;
10. prinsip kebersamaan;
11. Prinsip efisiensi berkeadilan;
12. Prinsip berkelanjutan;
13. Prinsip berwawasan lingkungan;
14. Prinsip kemandirian; dan
15. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan 15 asas pokok di atas, berikut ini akan disampaikan gagasan mengenai tema inti ilmu ekonomi yang seyogianya diinternalisasikan kepada peserta didik yang ada di Indonesia:

✓ **Pelaku Ekonomi dalam Jalan Lurus Pancasila**

a. Empat Pelaku yang bermotif *Societal Welfare*:

- 1) Koperasi (Soko Guru: dalam ruh Pancasila), usaha ekonomi yang **berwatak sosial**
- 2) Pemerintah, usaha ekonomi yang **bernuansa sosial**, BUMN (adalah usaha ekonomi pendukung sistemik), BUMD, BUMDes.
- 3) Swasta, usaha ekonomi yang **berkepedulian sosial**, yakni PT, CV, Firma dan Perseorangan
- 4) Sektor Informal, usaha ekonomi yang "digendong" oleh koperasi, berupa Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

b. Keterkaitan yang Tidak Saling Meniadakan. Peran empat pelaku ekonomi sebagai entitas bisnis dalam *societal wel-*

fare tidak saling meniadakan (*trade off*)

c. Peran, Kepemilikan dan Batasan Empat Pelaku Ekonomi.

1) Perlunya penjabaran peran masing-masing pelaku ekonomi, utamanya peran koperasi dalam menaungi UMKM.

2) Kepemilikan terhadap saham BUMN, BUMD dan BUMDes yang *go public* 50%+1 adalah milik pemerintah (Pusat, Daerah atau Desa).

3) Kepemilikan terhadap saham BUMN, BUMD dan BUMDes yang *go public* selain 50%+1 diutamakan untuk dimiliki koperasi (hubungan industrial Pancasila), dengan ketentuan tersendiri.

4) Kepemilikan terhadap perusahaan swasta diutamakan untuk dimiliki koperasi (hubungan industrial Pancasila), dengan ketentuan tersendiri.

✓ **Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang (*well-being*, bukan *welfare*)**

✓ **Menetapkan Komoditas/cabang produksi yang penting bagi negara**

✓ **Menetapkan Komoditas/cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak**

✓ **Keputusan ekonomi adalah keputusan rasional yang tidak terlepas dari pertimbangan moralitas.**

✓ **Efisiensi** yang berlaku dalam sistem ekonomi Pancasila-

la/Kerakyatan adalah **efisiensi yang berkeadilan**.

- ✓ **Peran kelembagaan negara**, adalah dominan dalam pengaturan penyelenggaraan perekonomian negara
- ✓ **Penetapan harga**: (1) oleh negara –**mekanisme pasar terkelola**– terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (2) oleh **mekanisme pasar**, terhadap cabang-cabang produksi yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banya
- ✓ **Mengembangkan Kearifan Lokal** bidang ekonomi sebagai kekuatan ekonomi nasional.

Tema-tema di atas selanjutnya dikembangkan dengan kerangka pembelajaran ekonomi yang tertuang dalam kurikulum pembelajaran ekonomi dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Berbagai Perspektif Ilmu Ekonomi yang Tidak Sekedar Bingkai

Semangat pluralisme ekonomi di Indonesia adalah semangat yang menerima perubahan dan pembaharuan - termasuk globalisme - sehingga berbagai perspektif ilmu ekonomi yang lain baik yang sejalan maupun bertentangan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi sebagai semangat untuk mengkomparasi dan memperkuat sistem ekonomi Pancasila.

Perspektif ilmu ekonomi baik klasik, neo-klasik, marxian, keynesian, post-keynesian, institutionalist, environmentalist, feminist, syariah dan penemuan baru lainnya adalah

perspektif ilmu ekonomi yang telah jelas rumusan-rumusan dan batasan-batasannya dalam menjelaskan disiplin ilmu ekonomi. Perspektif ini diajarkan kepada siswa bukan sekedar sebagai bingkai terhadap perspektif ilmu ekonomi Pancasila, melainkan diajarkan sebagai pilihan alternatif untuk memecahkan masalah ekonomi di sekitar peserta didik khususnya, serta secara nasional dan global.

Sistem Ekonomi Pancasila sebagai perspektif ilmu ekonomi (yang tidak anti pembaharuan) dibangun berdasarkan perkembangan ilmu ekonomi yang terjadi secara global. Lahir sebagai perpaduan dan perkembangan ilmu klasik, neo-klasik, dan marxian pada masa itu tidak menolak maupun menerima secara keseluruhan perspektif ilmu ekonomi yang sedang berkembang, menjadilah sistem ekonomi (yang seperti) campuran yang menekankan pentingnya (1) peran negara dalam mengatur perekonomian, khususnya yang menyangkut segala sesuatu yang (a) penting bagi negara dan (b) menguasai hajat hidup orang banyak, dan (2) memberikan kesempatan kepada individu dan mekanisme pasar di luar kedua hal tersebut.

Perkembangan berikutnya perspektif keynesian dan post keynesian sedikit berbeda dengan perspektif klasik dan neo-klasik yang mulai memberikan ruang kepada negara untuk berperan serta mengatur perekonomian, semakin memperkaya perspektif ilmu ekonomi Pancasila yang memang menerapkan peran negara dan kebebasan – terbatas– individu dalam sistem perekonomian.

Institutionalist sebagai perspektif yang lama namun baru berkembang pesat setelah kegagalan-kegagalan ekonomi pada negara-negara maju khususnya, dengan nama yang baru pula yakni *New Institutional Economic* (NIE) yang masih menggunakan dan menerima asumsi dasar ekonomi klasik terkait kelangkaan dan kompetisi, akan tetapi meninggalkan asumsi rasional instrumental. Yustika (2013) menyatakan bahwa “*New Institutional Economics* (NIE) merupakan teori ekonomi yang mencoba memperkenalkan pentingnya peran dari kelembagaan, namun tetap berargumentasi bahwa pendekatan ini bisa dipakai dengan menggunakan kerangka ekonomi neoklasik”. Penekanan NIE pada prinsipnya terletak pada (1) pengakuan individu yang apa adanya (*given*), (2) perilaku individu yang rasional, (3) interaksi antar individu, dan (4) aturan main dalam interaksi. Perspektif ini tentu akan memperkaya pembelajaran ekonomi Pancasila, yang juga ternyata memiliki kedekatan konsep dengan NIE.

Environmentalist dan *Feminist* yang merupakan perkembangan baru perspektif ilmu ekonomi dibangun berdasarkan paradigma ekonomi humanis tentu dekat dengan ekonomi Pancasila yang memang berperspektif humanis, sehingga konsep-konsep yang ditawarkan *Environmentalist* dan *Feminist* tentu dapat menjadi alternatif lain dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi.

Perspektif ilmu ekonomi lain yang bahkan telah diterapkan di Indonesia adalah ilmu ekonomi syariah, perkembangan kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia bahkan telah diatur. Dengan demikian pembelajaran ekonomi tidak mungkin

dilepaskan dengan bagaimana perspektif ilmu syariah dalam memecahkan masalah ekonomi.

Bagaimana Membelajarkan Ekonomi Pluralis di Indonesia

Pembelajaran berbagai perspektif ilmu ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat pertentangan-pertentangan antar perspektif ilmu tidak mungkin dihindarkan dalam pembelajaran ekonomi. Namun demikian tidak berarti tidak bisa dilakukan, harus ada solusi yang dapat dipilih, sehingga pembelajaran berbagai perspektif ilmu ekonomi dalam kerangka pluralis dapat dilakukan.

Sistem *plug in* dalam kurikulum ekonomi dapat dilakukan dengan mencantumkan berbagai perspektif alternatif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sebagaimana telah diungkap pada bagian sebelumnya, bahwa pilihan kombinasi pembelajaran deduktif – induktif adalah alternatif menarik, yang berupaya membawa peserta didik/mahasiswa ke dalam masalah ekonomi (baik melalui kajian, studi kasus, kunjungan maupun penelitian lapangan) yang selanjutnya ditawarkan berbagai alternatif pemecahan masalah dalam pandangan berbagai perspektif. Sebagaimana yang dilakukan oleh Austen yang menggunakan kehidupan dan hasil karya peraih nobel sebagai bahan pembelajaran ekonomi mikro dan makro, yang sebenarnya memberikan alternatif yang berbeda dalam kebiasaan pembelajaran ekonomi di negaranya Australia.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembelajaran ekonomi pluralis dapat dilakukan di Indonesia dengan mengedepankan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (dasar pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila) sebagai poros utama pembelajaran ekonomi di Indonesia, sementara itu perspektif ilmu ekonomi yang lain (klasik, neo-klasik, marxian, keynesian, post-keynesian, institutionalist, environmentalist, feminist, syariah, dll) diajarkan dalam rangka memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah ekonomi. Yang terpenting adalah bagaimana menjabarkan masing-masing perspektif yang ditinjau dari *Processes, Problems and Policies*.

Sistem *plug in* dalam kurikulum pembelajaran ekonomi dapat dilakukan dengan memasukkan pandangan-pandangan perspektif lain dalam pemecahan masalah ekonomi setelah terlebih dahulu disampaikan bagaimana sistem ekonomi Pancasila memandang/memecahkan persoalan ekonomi tersebut. Selanjutnya kombinasi pembelajaran deduktif – induktif dalam ekonomi adalah cara yang dapat digunakan untuk membelajarkan ekonomi pluralis.

Rekomendasi

Dari uraian di atas, adalah wajib mempertimbangkan untuk membelajarkan ekonomi pluralis dengan *core subject matter* – nya adalah perspektif ekonomi Pancasila yang merupakan falsafah negara. Bahkan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap kurikulum pembelajaran ekonomi yang berlaku saat ini, yang (seper-tinya) belum tertata dan terstruktur, yang ditandai dengan dominannya perspektif klasik dan neo-klasik.

Perlu dirumuskan bahan ajar (dapat berupa buku yang berlaku nasional) yang mencakup pembelajaran ekonomi pluralis, yang menguraikan berbagai perspektif dalam pemecahan ekonomi yang tidak sekedar memuat sejarah perkembangan ekonomi.

Perlu pula dilakukan penelitian (eksperimen) tentang bagaimana membelajarkan ekonomi pluralis, yang dimaksudkan untuk mencari alternatif pembelajaran ekonomi model ini, agar tidak memunculkan masalah baru di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Denis, Andy. Pluralism in Economics Education. *International Review of Economic Education*. Volume 8, Issue 2, 2009.
- Freeman, Alan. The Economists of Tomorrow: the Case for a Pluralist Subject Benchmark Statement for Economics. *International Review of Economic Education*. Volume 8, Issue 2, 2009.
- Harcourt, G. C. Critiques and Alternatives: Reflections on Some recent (and Not So Recent) Controversies. in *Fifty Years a Keynesian, and Other Essays*, Palgrave Macmillan, Cambridge pp. 289-299. 2001
- Linder, S. 1977. *The Anti-Samuelson*. New York: Urizon Books
- Mubyarto. *Bagaimana Belajar Ilmu Ekonomi*. Makalah untuk Seminar Bulanan ke-18 PUSTEP UGM, 6 Juli 2004
- Stilwell, Frank. Four Reason for Pluralism in Teaching of Economics, *Australasian Journal of Economics Education*. Vol. 3. Numbers 1 & 2, 2006

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia. 2014. Jakarta: Graha Media Pustaka
- Yustika, Ahmad Erani. 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga